

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ..... TAHUN 202X

TENTANG

KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| Batang Tubuh | | Penjelasan | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : | bahwa dalam rangka melaksanakan proses perizinan terhadap badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 44B dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan; | I. UMUM  Ketentuan Pasal 44B ayat (1) dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 44B ayat (3) dalam Pasal 202 UU P2SK diatur bahwa perizinan, pengaturan, pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU P2SK dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); | Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan pemrosesan perizinan sekaligus sebagai regulator dan pengawas independen terhadap badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.  Selanjutnya, dalam Pasal 321 UU P2SK diatur mengenai peralihan koperasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pasal tersebut memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar yang merupakan hasil penilaian Kemenkop UKM sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 2O2 UU P2SK, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima dari Kemenkop UKM sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan. |  |  |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana telah diatur dalam UU P2SK dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan merasa perlu untuk mengatur ketentuan mengenai peralihan koperasi simpan pinjam menjadi lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum koperasi. Adapun aspek pengaturan yang diperlukan adalah terkait dengan aspek kelembagaan (*entry regulation*) yaitu proses perizinan, termasuk di dalamnya mengenai konsekuensi dalam hal badan usaha koperasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga jasa keuangan. Aspek kelembagaan memiliki peran penting dalam rangka keberlanjutan usaha suatu lembaga jasa keuangan mengingat proses perizinan menjadi tahap penyaringan pertama atas masuknya pelaku sektor jasa keuangan ke dalam sistem keuangan di Indonesia. |  |  |
| MEMUTUSKAN: | |  |  |  |
| Menetapkan : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal-hal pokok mengenai tahapan dan mekanisme proses perizinan bagi koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti ruang lingkup dan permodalan, perizinan usaha, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan proses pemberian izin yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. |  |  |
|  | | II. PASAL DEMI PASAL |  |  |
| KETENTUAN UMUM | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: | | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan hukum Koperasi yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama melalui usaha bersama yang dikendalikan dan diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. | |  |  |  |
| 1. Koperasi Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut KSJK adalah badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memperoleh izin sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. | |  |  |  |
| 1. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. | |  |  |  |
| 1. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan pelindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria | |  |  |  |
| 1. Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur, termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura. | |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak. | |  |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. | |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah. | |  |  |  |
| 1. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi. | |  |  |  |
| 1. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab mengawasi kebijakan organisasi dan usaha. | |  |  |  |
| 1. Transformasi adalah perubahan kegiatan usaha Koperasi menjadi lembaga jasa keuangan. | |  |  |  |
| 1. Ekuitas adalah modal sendiri dari badan hukum Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. | |  |  |  |
| 1. Modal Disetor adalah modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| RUANG LINGKUP DAN PERMODALAN | |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Umum | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Kriteria Koperasi yang melaksanakan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut: | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan; | |  |  |  |
| 1. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain; | |  |  |  |
| 1. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain; | |  |  |  |
| 1. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau | |  |  |  |
| 1. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha lembaga pembiayaan dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan | |  |  |  |
| 1. Ruang lingkup Koperasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | |  |  |  |
| 1. BPR; | |  |  |  |
| 1. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; | |  |  |  |
| 1. Perasuransian; | |  |  |  |
| 1. Lembaga Penjamin; | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan; | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; | |  |  |  |
| 1. PMV; | |  |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian; | |  |  |  |
| 1. LKM. | |  |  |  |
| 1. Ruang lingkup Koperasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Koperasi Sektor Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| Bagian Kedua | |  |  |  |
| Pendirian Awal Koperasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Mekanisme permohonan perizinan dan pengawasan terhadap Koperasi yang mengajukan izin usaha sebagai lembaga jasa keuangan sejak awal pendirian mengacu kepada peraturan perundang-undangan di masing-masing sektor lembaga jasa keuangan. | | Cukup Jelas |  |  |
| Bagian Ketiga | |  |  |  |
| Transformasi Koperasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan. | | Ayat (1)  Cukup Jelas |  |  |
| 1. Koperasi yang akan bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria: | | Ayat (2) |  |  |
| 1. tidak memiliki permasalahan keuangan; dan | | huruf a  yang dimaksud dengan tidak memiliki permasalahan keuangan di antaranya tidak memiliki piutang macet. |  |  |
| 1. memiliki kemampuan keuangan yang memadai. | | huruf b  yang dimaksud dengan memiliki kemampuan keuangan yang memadai adalah Koperasi memiliki Ekuitas yang paling kurang sebesar Modal Disetor yang dipersyaratkan pada masing-masing lembaga jasa keuangan. |  |  |
| 1. Proses transisi transformasi koperasi menjadi lembaga jasa keuangan dan proses permohonan izin usaha mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | Ayat (3)  Cukup Jelas |  |  |
| Bagian Kedua  Permodalan | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Sumber dana setoran modal dalam rangka memenuhi persyaratan Transformasi harus:   1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. | | Cukup Jelas |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Persyaratan pemenuhan modal disetor minimum bagi Koperasi yang melakukan Transformasi sebagai: | |  |  |  |
| 1. BPR ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 1; | |  |  |  |
| 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 2; dan | |  |  |  |
| 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 3; | |  |  |  |
| 1. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berkedudukan di zona 1; | |  |  |  |
| 1. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berkedudukan di zona 2; dan | |  |  |  |
| 1. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berkedudukan di zona 3; | |  |  |  |
| 1. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi ditetapkan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Perasuransian ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi; | |  |  |  |
| 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | |  |  |  |
| 1. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi; | |  |  |  |
| 1. Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | |  |  |  |
| 1. Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | |  |  |  |
| 1. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi perusahaan pialang asuransi; | |  |  |  |
| 1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi perusahaan pialang reasuransi; dan | |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan penilai kerugian asuransi; | |  |  |  |
| 1. Lembaga Penjamin ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah usaha nasional; | |  |  |  |
| 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah usaha provinsi; | |  |  |  |
| 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; | |  |  |  |
| 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional; | |  |  |  |
| 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha provinsi; | |  |  |  |
| 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; | |  |  |  |
| 1. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan ulang; dan | |  |  |  |
| 1. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan ulang yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan ditetapkan paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); | |  |  |  |
| 1. PMV ditetapkan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); | |  |  |  |
| 1. PMV yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); | |  |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ditetapkan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) | |  |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; dan | |  |  |  |
| 1. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi; | |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; dan | |  |  |  |
| 1. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha provinsi; | |  |  |  |
| 1. LKM ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi LKM dengan lingkup wilayah usaha desa/kelurahan; dan | |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi LKM dengan lingkup wilayah usaha kecamatan; dan | |  |  |  |
| 1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi LKM dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota. | |  |  |  |
| 1. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit: | |  |  |  |
| 1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha desa/kelurahan; dan | |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kecamatan; dan | |  |  |  |
| 1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian atas ekuitas Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut: | |  |  |  |
| 1. Ekuitas Koperasi harus paling kurang sebesar Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan | |  |  |  |
| 1. Ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. | |  |  |  |
| 1. Pembagian zona pendirian BPR dan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan persyaratan modal disetor minimum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga jasa keuangan terkait, syarat modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga jasa keuangan terkait dimaksud. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Bagi Koperasi yang melakukan transformasi menjadi BPR atau BPR yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus memiliki: | |  |  |  |
| 1. modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan | | huruf a  Cukup Jelas |  |  |
| 1. rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). | | huruf b  Perhitungan rasio KPMM mengacu pada ketentuan mengenai KPMM BPR.  Yang dimaksud dengan ”Aset Tertimbang Menurut Risiko” adalah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR. |  |  |
|  | |  |  |  |
| Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi belum memenuhi ketentuan persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta persyaratan modal inti dan/atau rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Koperasi harus melakukan penambahan modal disetor atau modal inti melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. | | Cukup Jelas |  |  |
|  | |  |  |  |
| PERIZINAN USAHA | |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Izin perubahan kegiatan usaha Koperasi menjadi lembaga jasa keuangan diberikan dalam bentuk izin usaha sebagai Koperasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). | | ayat (1)  Cukup Jelas |  |  |
| 1. Izin usaha sebagai Koperasi Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Koperasi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | ayat (2)  Cukup Jelas |  |  |
| 1. Koperasi yang melakukan Transformasi menjadi lembaga jasa keuangan harus: | |  |  |  |
| 1. menyesuaikan anggaran dasar; | | huruf a  Cukup Jelas |  |  |
| 1. menyesuaikan kepemilikan; | | huruf b  Cukup Jelas |  |  |
| 1. menentukan anggota pengendali Koperasi; | | huruf c  Yang dimaksud dengan anggota pengendali Koperasi adalah pihak yang:   1. memiliki modal anggota pada Koperasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal Koperasi; atau 2. memiliki modal anggota pada Koperasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal Koperasi namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.   Definisi modal anggota mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian |  |  |
| 1. menentukan pengendali Koperasi yang memiliki pengendalian pada Koperasi yang melakukan Transformasi menjadi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah; | | huruf d  Yang dimaksud pengendali Koperasi adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengurus, pengawas, atau pengelola dan/atau memengaruhi tindakan pengurus, pengawas, atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7; | | huruf e  Cukup Jelas |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan Pengurus, Pengawas dan pengelola; | | huruf f  Cukup Jelas |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan Dewan Pengawas Syariah bagi Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | | huruf g  Cukup Jelas |  |  |
| 1. menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia; | | huruf h  Cukup Jelas |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan kinerja keuangan; dan | | huruf i  Cukup Jelas |  |  |
| 1. menyusun rencana bisnis atau rencana kerja. | | huruf j  Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dalam rangka memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |  |  |
| Bagian Kedua  Persetujuan Permohonan Izin Usaha | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); | |  |  |  |
| 1. pemeriksaan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau modal inti dan/atau rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; | |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana bisnis atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j; | |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan serta presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan strategi pengembangan Koperasi terhadap Pengurus, Pengawas, anggota pengendali Koperasi, pengendali Koperasi yang memiliki pengendalian pada Koperasi yang melakukan Transformasi menjadi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah, pengelola dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah; dan | |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di lembaga jasa keuangan terkait. | |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Koperasi untuk memastikan kesiapan operasional Koperasi. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) belum lengkap dan sesuai, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Koperasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dalam hal Koperasi tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dianggap membatalkan permohonan izin usaha. | |  |  |  |
| 1. Koperasi telah menyampaikan kelengkapan dokumen lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan izin usaha. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada Koperasi. | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |  |  |
| 1. Dalam hal Koperasi tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Koperasi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan oleh Koperasi tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga jasa keuangan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga jasa keuangan tetap menjadi kewenangan pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. | |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Pengumuman Transformasi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Pengurus Koperasi hasil Transformasi wajib mengumumkan Transformasi kegiatan usaha Koperasi menjadi lembaga jasa keuangan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di kantor Koperasi. | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif. | |  |  |  |
| 1. Pengurus Koperasi hasil Transformasi wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman. | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Dalam rangka keperluan peralihan KSP menjadi koperasi di SJK, OJK menunjuk satuan kerja penghubung dalam rangka korespondensi baik di internal maupun dengan pihak eksternal yaitu Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.​ | | Cukup Jelas |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1. Selama proses permohonan izin usaha, Koperasi di sektor jasa keuangan dilarang melakukan kegiatan usaha baru di luar kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin usaha.​ | | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Setiap perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.​ | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | | Cukup Jelas |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.​ | |  |  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

MAHENDRA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR